

Jakarta, Januari 2024

Mengawal Keberlanjutan Kiprah Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia

Sepenggal Tawaran dan Ajakan Kerja Bersama

Kawan-kawan yang kami hormati, salam sehat untuk kita semua.



Kita tentu sependapat bahwa masyarakat sipil di Indonesia harus tetap hadir, kuat, dan efektif sebagai penjaga demokrasi dan pemantau terpenuhinya hak-hak dasar warga negara; Sebagai penyeimbang kekuatan bagi dua aktor pembangunan lainnya yang punya potensi berkolusi, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan sektor swasta sebagai penguasa modal—keduanya akan cenderung berupaya memba-

tasi ruang-ruang gerak masyarakat sipil secara sistematis.

Hari ini, organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia makin melemah dan mengalami multikrisis: Relevansi dan signifikansinya memudar; Ide dan gagasannya berkurang; Sumber daya dan pendanaannya menyusut; Kaderisasi dan aktivisme nyaris menghilang; Ditambah melemahnya kemampuan beradaptasi dan berinovasi, serta buruknya konsolidasi dan hilangnya kekuatan kerja advokasi kebijakan secara kolektif.

Ketika posisi penting dan kebutuhan akan peran OMS mendapat pengakuan, pada saat yang sama OMS Indonesia tidak berdaya menghadapi perubahan drastis konstelasi antarpihak dan pergeseran pola-pola dukungan pendanaan. Pemerintah telah “mengadopsi” hampir semua isu yang tadinya disuarakan OMS—bahwa adopsi itu dinilai superfisial sebatas jargon belaka, itu soal lain. Sektor swasta telah “memilih” prinsip bisnis berkelanjutan sebagai syarat mutlak keberlanjutan bisnis mereka—bahwa pilihan itu dinilai sekadar taktik kehumasan yang tidak mengakar pada strategi perusahaan, itu pun soal lain. Dukungan lembaga donor terus (dan akan terus) berkurang, sebab pemerintah dinilai jauh lebih siap mengakuisisi serta mengelola dana-dana bantuan pembangunan melalui pembentukan dana perwalian dan pengembangan mekanisme BLU atau Dana Abadi. Lalu pada akhirnya yang tersisa bagi OMS hanya kesibukan mempertahankan eksistensi operasional masing-masing yang seadanya.

Upaya penguatan kapasitas OMS telah dilakukan sekian lama dengan berbagai variasi model intervensi. Platform pembelajaran bersama telah banyak dibangun. Bahkan baru-baru ini Yayasan Ananta yang dilengkapi *endowment fund* dan khusus diperuntukkan upaya penguatan kapasitas OMS Indonesia telah diinisiasi di tingkat nasional. Model pendanaan yang bisa langsung diakses oleh komunitas lokal dan masyarakat adat semacam Dana Nusantara juga telah berhasil dibentuk. Di samping itu dorongan untuk mulai memobilisasi sumber daya domestik telah juga mulai santer digaungkan sejak sekitar lima tahunan terakhir, seiring menguatnya kesadaran bahwa ketergantungan pada dukungan pembiayaan asing sudah tidak bisa lagi diharapkan dalam jangka panjang. Namun, Swakelola Tipe III dan IV yang tadinya memberikan secercah peluang, ternyata disadari tidak akan bisa banyak membantu.

Pokja Dana Abadi OMS dibentuk, tetapi tetap bergantung pada kemurahan hati pemerintah. Dana dukungan CSR jauh menurun saat ekonomi global terpuruk dan baru pelan-pelan bangkit setelah pandemi. Jikapun ada alokasi dana CSR, sebagian besarnya hampir pasti disikapi sebagai alat mitigasi konflik oleh korporasi. Sementara ekosistem donasi publik masih hanya memercayai isu keagamaan dan bencana—jauh dari, atau tidak terkoneksi dengan, isu dan kerja OMS yang selama ini menempatkan masyarakat sebagai konstituenya. Yang terakhir ini adalah bukti lain bahwa OMS kita tidak cukup punya legitimasi dan tampaknya rentan tercerabut dari akar sejatinya.

Karenanya, kita perlu memikirkan dan menemukan gagasan-gagasan baru serta cara-cara kerja baru. Semua kemungkinan-kesempatan perlu kita buka dan jajaki: entah mana nanti yang akan mampu menyelamatkan posisi dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Bersama surat ini, kami lontarkan gagasan pengembangan sebuah jaringan yang akan dinamai "PERPETUAL". Yakni jaringan nasional organisasi-organisasi Perantara dan Penyedia Bantuan Sponsor Fiskal, atau kita sebut sebagai *National Network of Intermediaries and Fiscal Sponsor*. Gagasan ini didasari beberapa keyakinan berikut:

Indonesia terlalu besar, dan tidak mungkin, tidak bisa, atau tidak boleh dikendalikan sentralistik oleh tingkat nasional di Jakarta. Keberdayaan OMS di Indonesia harus disandarkan pada kekuatan OMS lokal dengan pemahaman konteks lokal sepenuhnya. Pengelolaan sumber daya perlu dilakukan pada tingkat paling lokal yang dimungkinkan. Misalnya, kita dapat mem-

bayangkan jaringan Perpetual ada di tiap region: Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku, serta Papua). Pada prinsipnya, OMS lokal harus kembali menjadi sumbu penting pada tingkat lokal itu sendiri, yang berjuang untuk menjamin pemenuhan hak sipol dan ekosob warga lokal.

Saat ini lembaga-lembaga perantara hanya terpusat di Jakarta, sehingga semua perspektif dan lensa yang digunakan adalah kaca mata Jakarta-sentris. Kita tidak sadar bahwa masyarakat sipil sedang meniru dengan sangat baik kekeliruan pihak-pihak yang selama ini kita kritisi keras.

Kita perlu mengenal kembali upaya membangun Forum (Kerja) LSM dan *Community Foundation* pada tingkat regional di masa lampau, walaupun kita sama-sama tahu upaya tersebut telah gagal. Justru pembelajaran dari kegagalan tersebut harus menjadi titik tolak semangat kita, untuk mulai sekali lagi mencoba mendistribusi sumber daya dan kekuatan pengaruh secara lebih merata, lebih lokal, dan semoga lebih lestari, melalui pengembangan lembaga-lembaga

perantara pada tingkat region dan lokal.

Pada sisi yang lain, upaya peningkatan kapasitas organisasi bagi OMS selalu saja diarahkan pada suatu standar umum yang seringnya abai aspek historis dan karakteristik asli masing-masing OMS. Seluruh upaya peningkatan kapasitas OMS, sekali lagi, secara tidak sadar merupakan upaya standarisasi atas nama mitigasi risiko, dengan tujuan akuntabilitas dan transparansi yang tak jarang kebablasan.

Betapa tidak? Semua sumber daya akan membawa standar. Ketika standar-standar itu perlu dipenuhi, OMS akan butuh investasi awal yang sangat tinggi beserta biaya untuk menjaga pemenuhan standar tersebut secara rutin—yang biasanya tidak akan terjangkau pada masa-masa sulit. Kegagalan memelihara pemenuhan standar tersebut akan menyeret OMS kem-



**Kita perlu
memikirkan dan
menemukan
gagasan-gagasan
baru serta cara-cara
kerja baru. Semua
kemungkinan-
kesempatan perlu
kita buka dan jajaki:
entah mana nanti
yang akan mampu
menyelamatkan
posisi dan
keberlanjutan OMS di
Indonesia**

bali ke titik nol dalam peringkat penilaian kapasitas dan akuntabilitas organisasi, yang jelas-jelas kemudian menempatkan mereka kembali menjadi organisasi yang tidak layak dan tidak pantas mendapatkan dukungan.

Meminjam terminologi *fiscal sponsor* (kita perlu memformulasikan ulang definisinya menurut versi kita nanti), kami mengajak untuk mengembangkan lembaga perantara di atas menjadi lembaga yang menyediakan bantuan layanan sesuai standar yang diperlukan—terutama pada aspek legal, keuangan, akuntansi, jaminan fidusia, dan tuntutan administrasi lainnya—bagi kawan-kawan OMS lokal yang memang belum atau tidak akan dapat memenuhinya. Kita tentu percaya bahwa ketulusan, kegigihan, dan kesediaan mereka mengambil risiko di lapangan adalah segalanya, jauh di atas deretan standar yang disyaratkan. Mereka perlu disokong. Mereka perlu diwakili.

Pengembangan jaringan lembaga perantara ini pada gilirannya juga diharapkan dapat mengembangkan simpul-simpul pembelajaran yang saling terhubung, pusat-pusat penguatan kapasitas masyarakat sipil pada tingkat region, menumbuhkan kolektivitas advokasi kebijakan publik dan sekaligus memajukan daya tawar posisi OMS Indonesia.

Demikian ajakan kami.

Gagasan ini memanglah bukan paket tawaran yang sudah sempurna. Surat ini adalah undangan awal untuk mendiskusikan lebih mendalam bersama-sama kawan-kawan OMS lain yang punya kegelisahan dan niat yang sama. Jika kita bersepakat mengambil jalan ini, kita pasti menyadari konsekuensi yang akan mengikuti. Kita akan membutuhkan komitmen kuat, serta energi dan waktu yang akan terserap, untuk menapaki proses panjang penyiapan organisasi kita masing-masing dan menghadapi tantangan operasional yang nyata.

Saat ini, Penabulu dengan beberapa dukungan pendanaan proyek yang ada memiliki beberapa peluang untuk membantu kawan-kawan yang berniat menjadi lembaga perantara lokal dalam mempersiapkan OMS masing-masing pada aspek tata kelola, kebijakan organisasi, sistem dan prosedur, dan berbagai syarat standar akuntabilitas lainnya, seperti ISO manajemen mutu, audit keuangan, paket *safeguarding*, dsb.

Kami akan mendedikasikan seluruh pengalaman dan pengetahuan kami untuk membantu kawan-kawan semua. Kami juga akan berusaha sebaik-baiknya, bersama kawan-kawan semua, mengupayakan mobilisasi sumber daya, dari sumber mana pun dan melalui mekanisme penggalangan apa pun.

Kami percaya, untuk Indonesia yang lebih baik, tidaklah mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Mari diskusikan lebih lanjut.

Salam, sepenuh hormat kami,

Eko Komara

Penabulu Foundation

(Prospective Affiliate of Oxfam International)

Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu luas (sekaligus begitu terpisah-pisah) begitu besar populasinya tersebar di puluhan ribu desa, ratusan kabupaten/kota, puluhan provinsi begitu beragam, begitu banyak tantangan struktural termasuk kesenjangan dan ketidakadilan dengan pusat konsentrasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang selalu terrestrial-sentris Jawa-sentris Jakarta-sentris



Jaringan nasional organisasi-organisasi Perantara dan Penyedia Bantuan Sponsor Fiskal, atau kita sebut sebagai *National Network of Intermediaries and Fiscal Sponsor*

SUBSIDIARITAS

Pelaksanaan program-program pembangunan harus berlandaskan prinsip subsidiaritas, yaitu **memberikan kewenangan pengambilan keputusan dan pengelolaan kepada unit kompeten yang paling kecil, paling bawah.**

Subsidiaritas itu akan mendorong efisiensi dan penghematan biaya, pelibatan efektif dan peningkatan kepemilikan para pemangku kepentingan lokal, serta **memperbesar jaminan pencapaian dampak jangka panjang.**

Tidak bisa lagi struktur dan sistem pengelolaan program dikuasai langgeng oleh pihak tertentu atas dasar standar fidusia keuangan, tanggung jawab atas persyaratan amanah dan akuntabilitas keuangan.

Semua alasan tersebut yang akan dibongkar Perpetual, dengan menciptakan jaringan perwalian lokal yang andal dan tepercaya.

IMAJINASI

MASYARAKAT SIPIL YANG BERDAYA

Penantang tendensi konspirasi antara aktor pembangunan lain: pemerintah & sektor bisnis

LOKAL ADALAH POROS

Penguasaan sumber daya masyarakat sipil terpusat pada tingkat paling lokal, minimal di tiap region Indonesia

MANFAAT, MASLAHAT

Sumber daya masyarakat sipil yang terdistribusi tersebut lantas akan dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai konteks dan urgensi lokal, responsif terhadap kebutuhan dan kapasitas aktual, dan mampu menjaga api posisi dan peran OMS

OMS MENGAJAR KUAT

OMS yang berakar dan berkonstituen lokal, kuat, efektif, dan berkelanjutan berbasis sumber daya dan kesanggupan lokal.

NIATAN

Membongkar konsentrasi sumber daya OMS yang selama ini terpusat di tingkat nasional, yang juga menjadi kontributor penyebab ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan di Indonesia

Secara radikal mengubah struktur dan sistem penguasaan serta distribusi sumber daya OMS yang sudah lama terbentuk (dibentuk) oleh lembaga donor asing atas nama akuntabilitas dan mitigasi risiko (semata lensa ekonomi/keuangan)

Mengoreksi pola pengelolaan sumber daya OMS, dengan memperluas cakupan, menggali ke dalam organisasi dan sumber domestik lainnya, serta meningkatkan kecakapan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

Membangun model baru kapasitas kolektif pengelolaan sumber daya OMS berbasis karakteristik unik tiap jaringan.

Memperhubungkan dan mengonsolidasi pusat-pusat pertumbuhan gerakan OMS dalam kesetaraan relasi dan "keterikatan yang lepas"

RUANG KOLABORASI



Penguatan kapasitas organisasi perantara dan sponsor fiskal dalam keseluruhan aspek sesuai standar yang berlaku umum

Penggalangan dan mobilisasi sumber daya secara kolektif dengan berjejaring

Perintisan dana amanah bersama (*pooled fund, trust alliance*, dsb.) dan berbagai mekanisme penggalangan dana publik lainnya

Kajian dan advokasi kolektif demi perbaikan struktur dan sistem penguasaan serta distribusi sumber daya masyarakat sipil

Pembentukan simpul-simpul pengelolaan pengetahuan dan pengembangan produk/layanan masyarakat sipil

Fasilitasi pemeliharaan kanal kampanye kolektif dan memastikan dukungan bagi jaringan advokasi kebijakan publik

Pengembangan pusat-pusat peningkatan kapasitas dan dukungan sebaya bagi OMS setempat

Pengembangan model-model dukungan bagi komunitas terpinggirkan/terdampak krisis, termasuk dukungan bagi aktivis, jurnalis, dll.

Jika kondisi semakin memburuk, jika krisis atau bencana terjadi: **mobilisasi aksi kemanusiaan dan tanggap bencana** (alam, nonalam, dan sosial)



JALAN PANJANG TRANSFORMASI

